

**PENGARUH KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP  
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG  
PENDIDIKAN (STUDI DI KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN  
BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG)**

***THE EFFECT OF SOCIAL SERVICE COORDINATION ON THE  
EFFECTIVENESS OF PROGRAMS IN THE FAMILY OF HOPE OF  
EDUCATION (STUDY IN KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN  
BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG)***

**Rully Feroza<sup>1</sup>, Bambang Rudiansyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

<sup>2</sup>rudiansahb79@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius. Hal ini dikarenakan kemiskinan dapat memicu banyak persoalan yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan terselubung, dimana mereka tidak produktif dalam pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja. Hampir seluruh Wilayah yang ada di Indonesia mengalami hal yang serupa, maka dari itu menyikapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program Bantuan Sosial untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan, hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional, dan di tindaklanjuti melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.

**Kata Kunci:** Koordinasi, Efektivitas Program Keluarga Harapan bidang pendidikan

***ABSTRACT***

*Poverty that occurs in a country needs to be seen as a very serious problem. This is because poverty can trigger many problems that make it difficult for people to fulfill their needs. The problem of poverty is more triggered by the large number of people who fall into the hidden poverty category, where they are not productive in their jobs (seasonal). Unemployment in this model occupies a sizeable portion in the Indonesian society, so that many Indonesian families still have difficulty in fulfilling their needs, even though they are in a status and position at work. Almost all regions in Indonesia experience similar things, therefore responding this phenomenon, the Indonesian government is fully aware that there is a need*

*to build a Social Assistance Program to cover the decline in the purchasing power of the majority of the population who are classified as poor and help directly the people in need, as stated in Law No. 40 of 2004 concerning the guarantee system National social affairs, and was followed up by Presidential Regulation Number 15 of 2010 concerning the Acceleration of Poverty Reduction. Thus, in order to accelerate poverty reduction and the development of a social security system, the government launched the Hope Family Program (PKH). This program is motivated by the existence of the main problems of development, namely the still large number of poor people and the low quality of human resources.*

**Keywords:** *Coordination, Effectiveness of the Family Hope Program in education*

## 1. PENDAHULUAN

Selama ini persoalan kemiskinan yang terdapat di Kota Bandar Lampung terutama di Kelurahan Sukaraja salah satu permasalahan yaitu masih rendahnya sumberdaya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja. Sehingga, hal itu menjadi penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumberdaya manusia ini dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Berdasarkan grafik penduduk miskin Kota Bandar Lampung pada tahun 2014-2016 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 233.270 ribu jiwa.

Perkembangan kesejahteraan masyarakat dari varian tingkat pendidikan dan pekerjaan yang terdapat di Kelurahan Sukaraja Kota Bandar Lampung berjalan cukup lambat. Kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras ini membutuhkan penanganan yang tepat karena melihat dari kondisi geografis Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras ini terletak di wilayah perkotaan, kemiskinan yang terjadi di perkotaan itu secara konseptual penanganannya lebih sulit dibandingkan dengan wilayah di pedesaan, karena wilayah perkotaan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan adalah keuangan, oleh karenanya penanganan

penanggulangan kemiskinan di wilayah Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras ini benar-benar membutuhkan suatu program yang tepat pada sasaran. Menyadari akan hal itu, maka Program Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan di Kota Bandar Lampung untuk merespons permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kota Bandar Lampung khususnya yang terdapat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjerat keluarga sangat miskin (KSM). Dan disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada Keluarga sangat miskin (KSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Jika dilihat dari fakta empiris yang dijelaskan diatas, dan lebih parahnya hal ini tidak hanya terdapat diwilayah Bandar Lampung, melainkan hampir seluruh Wilayah yang ada di Indonesia mengalami hal yang serupa, maka dari itu menyikapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program Bantuan Sosial untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan, hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional, dan di tindaklanjuti melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.

Salah satu tujuan PKH adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak bagi anak-anak KSM, khususnya SD/MI dan SMP/MTs, serta untuk mengurangi pekerja dibawah umur di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, PKH pendidikan bermotivasi berupaya memotivasi Keluarga Sangat Miskin (KSM) agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung. Bagi anak-anak peserta PKH

yang tidak memenuhi komitmen kehadiran 85% dari hari belajar efektif setiap bulan akan dikenakan sanksi melalui pengurangan bantuan sebesar 10% dari setiap bulan sebelum pembayaran periode berikutnya. Ketentuan tidak berlaku bagi ketidakhadiran yang diakibatkan sakit, bencana alam dan bencana sosial.

Dengan bergulirnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintahan Daerah Bandar Lampung merespons masalah kemiskinan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G. 308/III.04/HK/2014 tentang pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung tahun 2014 yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan Pendidikan Dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan menerbitkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor :W/ 214 /Kpts/7/02/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung Tahun 2014. Dimana Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan Instansi yang memiliki tanggungjawab melaksanakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dimana salah satu tugasnya memberikan dampingan, arahan, informasi, peraturan dan pengambilan penyaluran bantuan kepada masyarakat kategori keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan.

Untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Berkoordinasi dengan beberapa instansi antara lain :

1. Badan Pusat Statistik

Mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk mensensus penduduk Bandar Lampung yang termasuk kedalam kategori masyarakat Keluarga Sangat Miskin (KSM), untuk diberikan berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan, kemudian data yang telah disensus diberikan kepada instansi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

2. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk memonitoring/memferivikasi pencatatan kehadiran siswa/siswi sekolah kategori Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan.

3. PT. Pos Kota Bandar Lampung

Mempunyai tugas pokok dan kewenangan memfalisitasi tempat dan memberikan penyaluran bantuan kepada masyarakat kategori Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sekalipun Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras telah melaksanakan program bantuan PKH sesuai yang direncanakan, namun berdasarkan peninjauan awal melalui observasi, memperlihatkan bahwa proses pengentasan kemiskinan melalui PKH

komponen pendidikan yang dilaksanakan di Kelurahan Sukaraja dalam realisasinya belum optimal yang diindikasikan dengan Adanya ketidakvalidan dan kelayakan peserta PKH. Contoh : Ada beberapa masyarakat yang tidak dapat bantuan PKH dikarenakan BPS masih menggunakan data lama.. Artinya pendataan dan penentuan yang dilakukan Instansi Badan Pusat Statitistik prioritas sasaran dari program ini belum tepat, Banyak petugas dari fasilitas pendidikan belum mengerti tentang PKH dan banyak diantara mereka yang tidak dapat undangan saat BIMTEK Provider sehingga sama sekali belum mengerti tentang PKH, Tidak disiplinnya masyarakat mengikuti peraturan PKH. Ada beberapa KSM yang tidak menghadiri pertemuan awal untuk mengikuti sosialisasi program..

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut “Seberapa Besar Pengaruh Koordinasi Dinas Sosial Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan bidang pendidikan di Kelurahan Sukaraja kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Koordinasi

Dalam konsep penelitian ini diarahakan kepada adanya Koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan program keluarga harapan (PKH) kepada masyarakat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sebagai penerima bantuan program. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan

perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program Nasional pemerintah pusat yang memberikan bantuan tunai bersyarat pada keluarga sangat miskin (KSM) dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dibidang pendidikan. Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDGs atau *Millenium Development Goals*) yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.

Konsep dasar dari koordinasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk ikatan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan bentuk pekerjaan atau usaha. Koordinasi dalam dunia kerja memberikan sisi pemahaman kepada satu pihak kepada pihak lain, sehingga terjadi simbiosis yang saling menguntungkan dalam melaksanakan sebuah sistem kerja. Hal ini berhubungan dengan pendapat dari Putra (2014: 1) yang menjelaskan bahwa, "Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu sehingga satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain."

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa koordinasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pihak yang mempunyai kedudukan yang sederajat dalam menentukan suatu bentuk sistem kerja, sehingga proses pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih kondusif dan berkesinambungan antara kepentingan satu pihak dan pihak lain yang tidak saling merugikan.

Didalam pelaksanaan koordinasi Program Bantuan Keluarga Harapan pada komponen pendidikan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat berjalan optimal, apabila mengacu pada prinsip-prinsip koordinasi sebagaimana: Mc Farland dalam Handayani (1996: 124-125), mengemukakan metode-metode koordinasi, sebagai berikut:

1. Koordinasi melalui kewenangan  
Penggunaan wewenang adalah merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik. Hal itu mungkin benar, apabila organisasi tersebut bersifat seragam (homogen) atau yang disebut *integrated type*. Dalam organisasi yang demikian itu, koordinasi melalui kewenangan dapat dijalankan secara efektif. Akan tetapi dalam kenyataannya organisasi yang betul-betul seragam (homogen) seratus persen jarang ditemukan adapun yang banyak ditemukan adalah organisasi yang bersifat heterogen yaitu organisasi yang mempunyai keanekaragaman jenis dan fungsi, yang didefinisikan pada struktur integrasi dari seluruh jenis dan fungsi hanyalah merupakan sub

system dari seluruh system pelaksanaan tugas pokok organisasi secara keseluruhan yang telah digariskan oleh pimpinan, demikian pula tugas dan fungsinya

2. Koordinasi melalui consensus

a. Konsensus melalui motivasi

Motivasi yang dimaksud antara lain berupa kepentingan bersama, nilai-nilai yang dimiliki bersama, bahkan dalam situasi tertentu mempunyai rasa solidaritas berdasarkan atas kesetiakawanan atau *esprit the corps*, yang dapat digunakan dalam menjamin kelancaran koordinasi.

b. Konsensus melalui sistem timbal balik

Sistem timbal balik atau saling membantu dapat dipergunakan dalam meningkatkan usaha koordinasi. Melalui sistem ini diusahakan adanya keseimbangan antara tuntunan organisasi tahu tuntutan individu baik yang bersifat material maupun non-material.

c. Konsensus melalui ide

Konsensus melalui ide atau dikatakan koordinasi melalui ide dimaksudkan bahwa setiap orang yang bekerja dalam organisasi berusaha mengidentifikasi dirinya dalam keseluruhan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Walaupun sukar bagi individu untuk mengidentifikasi dirinya dalam keanekaragaman tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi, akan tetapi

kenyataannya juga membuktikan bahwa metode/teknik ini juga nampaknya berhasil dalam usaha pembangunan.

3. Koordinasi melalui pedoman kerja

Setiap kebijaksanaan wewenang hubungan dan tata kerja serta prosedur kerja, dan sebagainya, kesemuanya merupakan landasan atau petunjuk yang disusun atas dasar manual, agar terdapat adanya kesatuan gerak dan kesatuan tindak, dalam rangka melaksanakan kebijakan.

Pedoman kerja atau petunjuk kerja (manual) dijadikan landasan berpijak dan bertindak bagi setiap kegiatan, sehingga diharapkan koordinasi dengan cara sebaik-baiknya. Jelaslah pedoman kerja atau petunjuk kerja, merupakan sarana pengikat dan pengarah berbagai kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kelemahan dalam pelaksanaan koordinasi fungsional mungkin dapat teratasi dengan adanya landasan berpijak dan bertindak bagi setiap instansi pemerintah yang terkait dalam hubungan kerja ini. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka manualisasi merupakan suatu kegiatan yang sudah mendesak untuk ditingkatkan pelaksanaannya karena adanya manual kerja, bukan saja akan meningkatkan koordinasi dalam rangka efisiensi kerja dan produktivitas kerja, tetapi akan mempermudah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

#### 4. Koordinasi melalui forum

Usaha-usaha koordinasi melalui forum, ialah dengan menggunakan suatu wadah tertentu (wahana) yang dapat digunakan sebagai cara mengadakan tukar menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam memecahkan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal lainnya yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun wahana yang dikenal sebagai forum koordinasi ialah tim kerja, panitia suatu tugas dan bentuk-bentuk perwadhahan lainnya. Wahana koordinasi dapat bersifat intern dalam lingkungan suatu organisasi, terutama bagi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh unit atau organisasi yang bersangkutan.

#### 5. Koordinasi melalui konferensi

Koordinasi melalui konferensi diartikan dengan rapat-rapat atau sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan penting sekali artinya, tidak hanya semata-mata dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaannya, akan tetapi digunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi. Dengan demikian dapat tercegah persepsi perkotak-kotak tindakan sikap dan perilaku anggota organisasi.

Dengan demikian kiranya metode-metode koordinasi tersebut dapat diterapkan oleh Dinas Sosial kepada

Aparat pelaksana operasional agar lebih maksimal dalam melaksanakan bantuan Program Keluarga Harapan kepada masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Buni Waras Kota Bandar Lampung.

## 2.2 Pengertian Efektivitas

Pengertian dasar dari efektivitas berasal dari kata efektif (hasil guna), karena pada akhirnya bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh konsep efektivitas (*effectiveness*). Setiap kegiatan manajemen dalam organisasi ditujukan untuk mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, dimana dengan efektivitas yang tinggi segala apa yang direncanakan dapat dicapai, baik dari sudut kualitas, kuantitas maupun waktu.

Pengertian efektivitas, banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Hutapea dalam Sedarmayanti(2001: 98), yang menyatakan sebagai berikut:

“Efektivitas berasal dari kata efek, yang berarti mempunyai pengaruh yang besar dan tepat, memberikan perubahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan. Efektif titik beratnya adalah tepat sasaran, berarti dengan input yang tersedia dapat mencapai output yang direncanakan”.

Pendapat di atas menurut peneliti menerangkan bahwa suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak selamanya disertai dengan efisiensi yang maksimum. Dengan

perkataan lain manajemen yang efektif tidak perlu disertai manajemen yang efisien.

Steers (1985:4-7) mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu :

1. Paham mengenai optimalisasi tujuan : efektifitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.
2. Perspektif sistematika : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi.
3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi : bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi

## **2.2 Pengertian Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan bagi anggota keluarga KSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban KSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan

penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH, Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH dan Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang menjadi panduan penelitian, maka diajukan hipotesis sebagai berikut : “Besarnya Pengaruh Koordinasi Dinas Sosial Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ditentukan oleh pelaksanaan dimensi koordinasi melalui koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum dan koordinasi melalui konferensi”.

### 3METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ini adalah Metode Eksplansi (*Explanatory Research*) dimana data dan informasi dikumpulkan dari populasi, hasilnya kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mengukur pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Metode ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka dinamakan penelitian penjelasan (*Explanatory Research*). Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data yaitu Sumber Data Sekunder dan Sumber Data Primer. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : Observasi , Wawancara dan Angket. Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah dari Petugas Pemerintah Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi WarasKota Bandar Lampung dan masyarakat miskin yang mendapat Program Keluarga Harapan. Untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan, digunakan digunakan teknik analisa data “Regresi Linier Sederhana”

#### 1. PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, pengaruh yang ditimbulkan oleh koordinasi terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung adalah sebesar 53,7% . Hal ini menunjukkan adanya variabel lain diluar koordinasi yang memberikan kontribusi terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sebesar 46,3%.

Pengaruh yang kuat antara variabel koordinasi dengan Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tidak terlepas kaitannya dengan koordinasi dalam mengelola perilaku tugas dan hubungan dengan institusi sebagai sasaran program yang dilaksanakan.

Berdasarkan pada perhitungan pengolahan data, diperoleh nilai pada Variabel Koordinasi pada Dimensi Koordinasi Melalui Kewenangan adalah sebesar 499 Nilai tersebut berada pada interval penilaian Cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa Koordinasi pada Dimensi Koordinasi Melalui Kewenangan dinilai oleh para responden adalah Cukup baik. Artinya bahwa Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah cukup maksimal melaksanakan koordinasi melalui kewenangan hal ini sebagaimana disampaikan Mc. Farlan dalam Handyaningrat (1996:124-125) yaitu Penggunaan wewenang adalah merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksanannya koordinasi dengan baik. Hal itu mungkin benar, apabila organisasi tersebut bersifat seragam (homogen) atau yang disebut *integrated type*. Dalam organisasi yang demikian itu, koordinasi melalui kewenangan dapat dijalankan secara efektif. Akan tetapi dalam kenyataannya organisasi yang betul-betul seragam (homogen) seratus persen jarang

ditemukan adapun yang banyak ditemukan adalah organisasi yang bersifat heterogen yaitu organisasi yang mempunyai keanekaragaman jenis dan fungsi, yang didefinisikan pada struktur integrasi dari seluruh jenis dan fungsi hanyalah merupakan sub system dari seluruh system pelaksanaan tugas pokok organisasi secara keseluruhan yang telah digariskan oleh pimpinan, demikian pula tugas dan fungsinya.

Variabel Koordinasi pada Dimensi Koordinasi Melalui Konsensus dapat disimpulkan bahwa Koordinasi pada Dimensi Koordinasi Melalui Konsensus dinilai oleh para responden adalah Cukup baik. Artinya Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah cukup baik melaksanakan dimensi koordinasi melalui konsensus. Menurut Mc. Farlan dalam Handyaningrat (1996:124-125) menyebutkan bahwa dalam koordinasi konsensus dapat dilakukan dengan berbagai cara dipergunakan dalam organisasi besar dan kompleks yang mempunyai jenis beraneka ragam, yaitu dengan konsensus memberikan motivasi timbal balik dan kesepakatan melalui ide

Variabel Koordinasi pada Dimensi Koordinasi Melalui Pedoman Kerja dapat disimpulkan bahwa Koordinasi pada Dimensi Koordinasi Melalui Pedoman Kerja dinilai oleh para responden adalah Cukup baik. Artinya Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya melaksanakan koordinasi melalui pedoman kerja seperti yang dijelaskan oleh Mc. Farlan dalam Handyaningrat (1996:124-125) menjelaskan bahwa, Setiap kebijaksanaan wewenang hubungan dan tata kerja serta prosedur kerja, dan sebagainya, kesemuanya merupakan landasan atau

petunjuk yang disusun atas dasar manual, agar terdapat adanya kesatuan gerak dan kesatuan tindak, dalam rangka melaksanakan kebijakan. Pedoman kerja atau petunjuk kerja (manual) dijadikan landasan berpijak dan bertindak bagi setiap kegiatan, sehingga diharapkan koordinasi dengan cara sebaik-baiknya. Jelaslah pedoman kerja atau petunjuk kerja, merupakan sarana pengikat dan pengarah berbagai kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Variabel Koordinasi dapat disimpulkan bahwa Koordinasi pada Dimensi Koordinasi Melalui Forum dinilai oleh para responden adalah Cukup baik. Artinya Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya melaksanakan koordinasi melalui forum seperti yang dijelaskan oleh Mc. Farlan dalam Handyaningrat (1996:124-125) menyebutkan bahwa, Usaha-usaha koordinasi melalui forum, ialah dengan menggunakan suatu wadah tertentu (wahana) yang dapat digunakan sebagai cara mengadakan tukar menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam memecahkan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal lainnya yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun wahana yang dikenal sebagai forum koordinasi ialah tim kerja, panitia suatu tugas dan bentuk-bentuk perwadhahan lainnya. Wahana koordinasi dapat bersifat intern dalam lingkungan suatu organisasi, terutama bagi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh unit atau organisasi yang bersangkutan.

Variabel Koordinasi pada Dimensi Koordinasi Melalui Konferensi dapat disimpulkan bahwa Koordinasi pada Dimensi Koordinasi Melalui Konferensi dinilai oleh para responden adalah Cukup. Artinya Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah cukup maksimal melaksanakan koordinasi melalui konferensi seperti yang dijelaskan oleh Mc. Farlan dalam Handayani (1996:124-125) menyebutkan bahwa, Koordinasi melalui konferensi diartikan dengan rapat-rapat atau sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan penting sekali artinya, tidak hanya semata-mata dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaannya, akan tetapi digunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi. Dengan demikian dapat mencegah persepsi perkotak-kotak tindakan sikap dan perilaku anggota organisasi.

Berdasarkan hasil pengujian, terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sebesar 46,3% . Hal ini menandakan bahwa masih terdapat variabel lain yang cukup besar pengaruhnya dan belum dikaji pada penelitian ini yaitu variabel Pengendalian.

## **2. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum dan koordinasi melalui

konferensi. berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung .

Hasil pengujian hipotesis melalui perhitungan Regresi Linier Sederhana menunjukkan bahwa koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum dan koordinasi melalui konferensi belum optimal. hal ini menyebabkan belum optimalnya Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung

Pengaruh yang kuat antara Koordinasi dengan Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung., serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain selain variabel Koordinasi yang turut mempengaruhi terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Teoritis

Hasil ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan variabel pengendalian, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian manajemen pemerintahan.

### 5.2.2 Saran Praktis

Dari hasil penelitian mengenai Koordinasi dengan Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung., peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya zdinas Sosial Kota Bandar Lampyng dapat menggunakan wewenang untuk melakukan kerjasama dengan institusi lain agar pelaksanaan Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat tercapai sesuai harapan
2. Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antar instansi yang berwenang dengan memadukan program program yang selaras dalam pelaksanaan Efektivitas Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung
3. Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk memberikan pembagian tugas kepada masing-masing instansi yang terkait agar

pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat berjalan optimal.

4. Disarankan kepada masing-masing instansi yang terkait untuk memanfaatkan forum pertemuan agar Program Keluarga Harapan dapat tercapai sesuai yang diharapkan
5. Disarankan Kepada Dinas Sosial Kta Bandar Lampung untuk selalu melaksanakan rapat rutin dengan tim koordinasi agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Handyaningrat. 1989. *Manajemen Konflik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Putra, A. Hani. (2014). *Pengertian dan Tujuan Koordinasi*. Jakarta: Wahyu Media.

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S

Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.

### B. Pedoman dan Sumberlain :

Republik, Indonesia. 2010 Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor :W/ 214 /Kpts/7/02/2014 tentang *Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung Tahun 2014*.